

## **BAB III**

### **ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **3.1.1. Permasalahan Internal**

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi permasalahan keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan kapasitas yang belum memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan Sumber Daya Manusia ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil Sumber Daya Manusia yang signifikan.

##### **3.1.2. Permasalahan Eksternal**

Selain dari pada permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban juga menghadapi berbagai permasalahan eksternal, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup berusaha mengidentifikasi permasalahan - permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan / lahan.

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Hasil analisis gambaran pelayanan OPD	Pelayanan pengendalian pencemaran air	SPM	1. Belum optimalnya pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dalam menunjang ketersediaan data dan informasi terkait dengan lingkungan hidup.  2. Belum adanya tenaga teknis jabatan fungsional  3. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan pencemaran lingkungan.	1. Cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan kapasitas yang belum memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran
	Pelayanan pengendalian pencemaran udara	SPM			
	Pelayanan informasi kerusakan lahan produksi biomasa	SPM			
	Pelayanan pengaduan masyarakat	SPM			

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Hasil Analisis Renstra BLH Prop.Jatim	Pelayanan informasi status mutu air (100%)	SPM	1. Belum lengkapnya ketersediaan data inventarisasi potensi lingkungan hidup 2. Masih terbatasnya tenaga teknis (jabatan fungsional belum ada)	3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Kurangnya upaya konservasi terkait dengan masalah lingkungan hidup 5. Masih mahalnya teknologi pengolahan limbah	Kapasitas dan kompetensi SDM yang terbatas
	Pelayanan informasi status mutu mutu udara (100%)	SPM			
	Pelayanan informasi tindak lanjut pengaduan masyarakat (100 %)	SPM			
	Penegakan hukum	Permendagri 54/2010		Belum terimplementasinya penegakan hukum berdasarkan UU 32/2009	

### **3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telahaan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH Terpilih adalah sebagai berikut:

#### **3.2.1. Visi**

Visi Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan kondisi masyarakat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis maupun potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka visi kabupaten Tuban untuk jangka waktu lima tahun ke depan adalah : ***“Kabupaten Tuban yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera”***

#### **3.2.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diperlukan upaya – upaya untuk mewujudkannya al.:

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih.
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah.
4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah terletak pada Misi Utama Ke-3, yaitu **“Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah”**, yang bertujuan untuk **“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur pembangunan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan”**.

Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan rumusan yang lebih terarah, maka sasaran dan strategi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatkan kualitas lingkungan dan upaya pelestarian sumber daya hayati dengan strategi menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air, disamping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga air irigrasi pertanian rakyat melalui Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan.
- 3) Mewujudkan pengelolaan laboratorium yang optimal dengan menerapkan standar system manajemen mutu laboratorium ISO 17025 untuk mendukung kualitas data dan informasi lingkungan hidup melalui program optimalisasi pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2016 - 2021 masih dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri, rumah

tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, kerusakan lingkungan hidup di daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

### 3.3.1. Review Renstra KLHK Tahun 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 -2019, maka tujuan dan sasaran strategis serta program prioritas dan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah sebagai berikut :

#### a. Tujuan

1. Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species.
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

#### b. Sasaran

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.

2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

c. Program Prioritas

1. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
2. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.
3. Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan.
4. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
6. Program Pengendalian Perubahan Iklim.
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Program Planologi dan Tata Lingkungan.

10. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
11. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya.
12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK.

### 3.3.2. Review Renstra BLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 memuat tujuan dan sasaran serta program prioritas dan target kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

#### a. Tujuan

1. Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui Upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

#### b. Sasaran

1. Meningkatnya luasan lahan kritis terehabilitasi.
2. Meningkatnya debit atau kapasitas pasok sumber mata air.
3. Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan.
4. Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan.
5. Meningkatnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan.
6. Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup.



7. Meningkatnya instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan lingkungan.
9. Meningkatnya penataan hukum lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan atau industri.
10. Meningkatnya kualitas air pada titik yang dipantau dengan metode STORET atau metode indeks pencemaran air.
11. Meningkatnya kualitas udara ambien pada titik yang dipantau dengan metode indeks pencemaran udara.
12. Meningkatnya penyelesaian kasus hukum lingkungan hidup.
13. Meningkat dan berkembangnya pelaksanaan Program Good Environmental Governance (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik.
14. Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.
15. Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup.
16. Pengembangan Peraturan Perundang - undangan Bidang Lingkungan Hidup.
17. Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.
18. Meningkatnya penerapan manajemen dan fasilitas pengelolaan limbah.
19. Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan.
20. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kapasitas UPT Laboratorium Lingkungan.
21. Meningkatnya upaya penurunan emisi GRK.

c. Program Prioritas

1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

**Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Berdasarkan sasaran Renstra Badan Lingkungan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.**

Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya luasan lahan kritis ter rehabilitasi.	Minimnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi pelestarian lingkungan hidup; Minimnya pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan bidang lingkungan hidup	Kepentingan lingkungan hidup seringkali kalah dengan kepentingan investasi (ekonomi) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka menjalankan fungsi – fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang lingkungan hidup	Semakin bertambahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pengusaha dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
2. Meningkatnya debit atau kapasitas pasok sumber mata air.			
3. Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan.			
4. Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan.	Semakin bertambahnya jumlah industri di Kabupaten Tuban sehingga meningkatkan potensi pencemaran lingkungan Meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap permasalahan bidang lingkungan hidup yang menuntut penanganan lebih cepat dan profesional	Kurangnyasarana dan prasarana dalam rangka mendukung berjalanya fungsi – fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang lingkungan hidup	
5. Meningkatnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan.			
6. Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup.			
7. Meningkatnya instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Perlunya peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan	sesuai tugas pokok dan fungsi bidang lingkungan hidup	
8. Meningkatnya kualitas pelayanan			

Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>perijinan lingkungan.</p> <p>9. Meningkatnya penataan hukum lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan atau industry.</p>	<p>yang ada di Kabupaten Tuban</p> <p>kurangnya ketersediaan data dan informasi Sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>Adanya kepentingan – kepentingan diluar konteks lingkungan hidup yang terkadang melingkupi kasus/permasalahan bidang lingkungan hidup;</p> <p>Lemahnya koordinasi antar sector dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>	
<p>10. Meningkatnya kualitas air pada titik yang dipantau dengan metode STORET atau metode indeks pencemaran air.</p> <p>11. Meningkatnya kualitas udara ambien pada titik yang dipantau dengan metode indeks pencemaran udara.</p> <p>12. Meningkatnya penyelesaian kasus hukum lingkungan hidup.</p>			
<p>13. Meningkat dan berkembangnya pelaksanaan Program Good Environmental Governance (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik.</p>			
<p>14. Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.</p> <p>15. Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang</p>			

Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
lingkungan hidup. 16. Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup. 17. Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. 18. Meningkatnya penerapan manajemen dan fasilitas pengelolaan limbah. 19. Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan.			
20. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kapasitas UPT Laboratorium Lingkungan.			
21. Meningkatnya upaya penurunan emisi GRK.			

Dengan mengacu pada sasaran dan program prioritas K/L serta Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut diatas serta berdasarkan pada Visi – Misi Kepala Daerah terpilih, kemampuan anggaran, kemampuan aparatur, tingkat kesadaran masyarakat dan realitas kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tuban, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban mengambil fokus sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengawasan dan pemantauan lingkungan dalam menunjang daya dukung lingkungan hidup.

2. Terwujudnya pengelolaan laboratorium yang optimal dalam menunjang data dan informasi lingkungan hidup.

Dengan program prioritas sebagai berikut :

1. Program Penataan Lingkungan.
2. Program Pemberdayaan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3.
3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Urusan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Hidup.
5. Program Pemberdayaan Pengelolaan Lingkungan.
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

dan hasil telaahan terhadap pelaksanaannya, maka diperoleh bahwa pengembangan wilayah Kabupaten Tuban telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Telaahan RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.**

Implikasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Terkait RTRW Kabupaten Tuban			
1. Meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang wilayah	1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup	1. Belum adanya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial 2. Masih terbatasnya infrastruktur untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan 3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	1. Adanya regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Adanya kelembagaan (pemerintah dan masyarakat) dalam mengelola lingkungan hidup
2. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Belum adanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
3. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan	1. Belum optimalnya pengawasan usaha 2. Masih meningkatnya pencemaran air tanah, air permukaan oleh aktivitas manusia 3. Kurangnya penegakan hukum lingkungan		
Terkait KLHS Kabupaten Tuban			
1. Penetapan daya dukung dan daya tampung	1. Masih rendahnya pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan		
2. Kegiatan perencanaan pengelolaan limbah dan persampahan untuk semua kegiatan	1. Belum optimalnya penggunaan sumber daya alternatif		

Pembangunan di Kabupaten Tuban tidak hanya memperhatikan sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan KLHS yang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan

yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. KLHS menjadi kerangka integratif bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban untuk :

1. Meningkatkan manfaat pembangunan;
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;
3. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan;
4. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan ditingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2016 (Renstra BLH 2011-2016) dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Tuban, dapat dirumuskan 1 (satu) isu pokok : “Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui optimalisasi peran masyarakat”.

Isu dimaksud timbul dari berbagai permasalahan lingkungan al. :

1. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan pencemaran lingkungan.
2. Kurangnya upaya konservasi terkait dengan masalah lingkungan hidup.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan.
4. Belum optimalnya pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dalam menunjang data dan informasi terkait dengan lingkungan hidup.